

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
BONTO-BONTOA KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN BANTAENG**

SKRIPSI



**NURSYAMSI
NIM:105711106120**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

JUDUL PENELITIAN:

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
BONTO-BONTOA KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN BANTAENG**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

**NURSYAMSI
NIM:105711106120**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sukses adalah pilihan, jika kau ingin melihat dirimu sukses maka lihatlah sejauh mana engkau melangkah hari ini, sebab hidup adalah sebuah pilihan.

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tua tercinta atas semua doa dan pengorbanan beliau sehingga saya bisa sampai di titik ini.

PESAN DAN KESAN

Percayalah hari ini kita telah membuktikan bahwa kita adalah yang terbaik, setiap diri adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri, perjalanan yang panjang dengan segala proses yang telah kita lewati semua karna kita yakin dan percaya pada diri kita masing-masing, terimakasih untuk raga yang tetap kuat dan terimakasih untuk jiwa yang telah menemani.



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Bantaeng
Nama Mahasiswa : Nursyamsi
No. Stambuk/ NIM : 105711106120
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia
penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 27 Agustus 2024 di Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 September 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Ismail Rasulong, SE., MM
NIDN. 0905107302

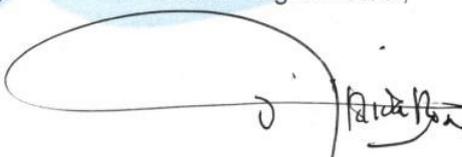

Zalkha Soraya, SE., MM
NIDN. 0904058504

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Program Studi,


Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
NBM: 651 507


Asdar, SE, M.Si
NBM: 71055



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Nursyamsi Nim : 105711106120 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0003/SK-Y/60201/091004/2024M, Tanggal 22 Safar 1446 H/ 27 Agustus 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

03 September 2024

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr Ir H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si (.....)
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M. ACC (.....)
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Muhammad Ikram Idrus, M.S (.....)
2. Hj. Naidah, SE, M. Si (.....)
3. Asdar, SE., M. M (.....)
4.A. Nur Achasanuddin UA, S.E, M. Si (.....)

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 507



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nursyamsi
No. Stambuk/ NIM : 105711106120
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Penelitian : Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan
Infrastruktur Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu
Kabupaten Bantaeng

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan jiplakan dan tidak dibukan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 03 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Nursyamsi
105711106120

Diketahui Oleh:


Dekan
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
NBM. 651 597


Ketua program Studi
Asdar, SE., M.Si
NBM. 128 6845

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nursyamsi
NIM : 105711106120
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Nonexclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 03 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Nursyamsi
105711106120

ABSTRAK

NURSYAMSI, Tahun 2024. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa*. Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I bapak Ismail Rasulong dan Pembimbing II ibu Zalkha Soraya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa Bonto Bonto Kecamatan Tompobulu di Kabupaten Bantaeng. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara yang dilakukan pada 5 orang informan yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Umum, serta masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa Program Pembangunan Infrastruktur desa Bonto Bonto Kecamatan Tompobulu di Kabupaten Bantaeng sudah cukup berjalan dengan baik jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari indikator yang pertama yaitu pencapaian tujuan, dimana dalam pelaksanaan program tersebut semua dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran, indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan terlebih dahulu dalam musyawarah desa sebelum melaksanakan program pembangunan, kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi, dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya dilampirkan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya.

Kata Kunci: Efektivitas Dana Dese dan Infrastruktur Desa



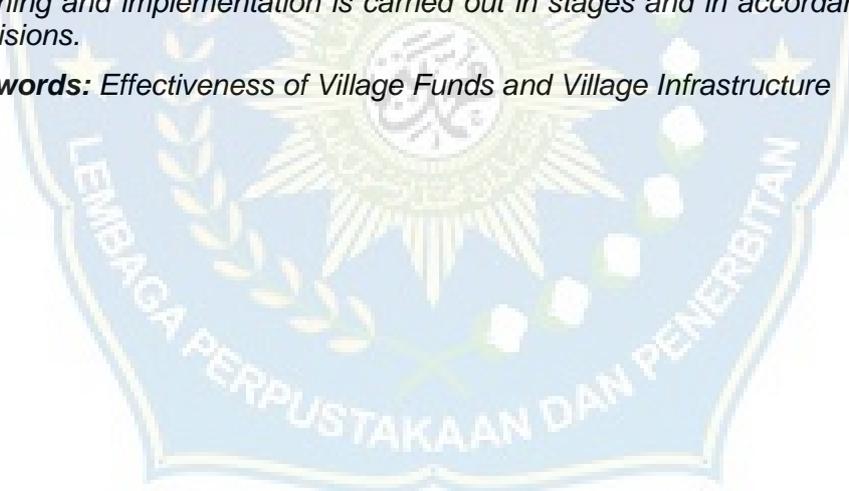
ABSTRACK

NURSYAMSI, 2024. Effectiveness of Using Village Funds for Village Infrastructure Development. Thesis of the Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Supervisor I Mr. Ismail Rasulong and Supervisor II Mrs. Zalkha Soraya.

The aim of this research is to determine the effectiveness of using village funds for infrastructure development in Bonto Bontoa village, Tompobulu District in Bantaeng Regency. This type of research is qualitative research. The data processed is the result of interviews conducted with 5 informants, namely the Village Head, Village Secretary, Head of Planning and General Affairs, and the community. The data collection methods used in this research are observation, interviews and documentation.

The results of the research obtained are that the Infrastructure Development Program for Bonto Bontoa Village, Tompobulu District in Bantaeng Regency has been running quite well if seen from the three indicators of effectiveness starting from the first indicator, namely goal achievement, where in the implementation of the program everything is implemented and completed on time. and right on target, the second indicator is integration, where the program has been or has been socialized first in village meetings before implementing the development program, then the third indicator is adaptation, where the program planning and implementation is carried out in stages and in accordance with the provisions.

Keywords: *Effectiveness of Village Funds and Village Infrastructure*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "*Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng*". Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Gaffar dan Ibu Salmah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Juga seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr Ir H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IP, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Asdar, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Zalkha Soraya, SE., MM selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak pernah lelah meluangkan waktu dan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Untuk kedua orang tua saya tercinta, Bapak Gaffar dan Ibu Salmah yang telah memberikan dukungan, doa dan selalu mengusahakan segala hal yang terbaik untuk penulis selama perkuliahan.
8. Untuk saudara-saudari saya tercinta yaitu kakak Muhammad Amin faisal yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.
9. Untuk teman-temanku balance dan teman teman kelas saya Ep 20 A yang sangat saya cintai yang telah menjadi sahabat selama perkuliahan, selalu kebersamai dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 31 Mei 2024

Nursyamsi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERYATAAN	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGATAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Efektivitas	7
2. Desa	8
3. Dana Desa.....	13
4. Pembangunan.....	21
5. Transparansi.....	24
6. Infrastruktur.....	26
B. Tinjauan Empiris.....	27
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Fokus Penelitian	33
C. Tempat dan waktu Penelitian.....	34
D. Jenis Dan Sumber Data.....	34
E. Informan	35

F. Teknik Pengumpulan data	35
G. Metode Analisi Data.....	36
BAB IV. HASIL PENELITIAN.....	38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
B. Hasil Penelitian.....	44
C. Pembahasan	53
BAB V. PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Daftar Informan	35
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	42
Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana	43
Tabel 4.3 Program Pembangunan 2019	44
Tabel 4.4 Program Pembangunan 2020	45
Tabel 4.5 Program Pembangunan 2021	45
Tabel 4.6 Program Pembangunan 2022	46
Tabel 4.7 Program Pembangunan 2023	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	32
Gambar 4.1 Peta Bonto Bontoa.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Agung Pratama. Baik UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas mengakui keberadaan desa. Menurut ketentuan tersebut, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia, serta kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif masyarakat.

Berdasarkan penafsiran di atas, Desa berfungsi sebagai suatu kesatuan politik yang mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi masyarakatnya. Desa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara keseluruhan karena posisinya. Desa merupakan pemimpin dalam mencapai keberhasilan dalam seluruh inisiatif dan kegiatan pemerintah.

Di Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keuangan desa digunakan untuk mencapai pembangunan. Sebuah program penting yang sedang dijalankan pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat pedesaan. Program dana desa telah berkembang menjadi alat bagi desa-desa di Indonesia untuk berkembang dan mendapatkan kewenangan lebih. Yang dimaksud dengan "Dana Desa" adalah uang yang

dikirimkan melalui APBD kabupaten/kota dari APBN yang diperuntukkan bagi desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dibutuhkan banyak upaya dari berbagai komponen yang ada saat ini, baik dari pemerintah daerah, elemen desa, maupun masyarakat itu sendiri, agar pembangunan desa bisa mengejar ketertinggalan pembangunan kota. Tujuan pembangunan adalah untuk mempertahankan kemajuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup penduduk pedesaan.

Intinya, keuangan desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur; pemberdayaan masyarakat juga harus diperhatikan dan dilakukan agar pembangunan dapat berkeadilan. Menerapkan modal usaha produktif, seperti ke perusahaan-perusahaan di lingkungan sekitar, mungkin bisa menjadi salah satu cara untuk memberdayakan masyarakat.

Tujuan pembangunan yang didanai oleh uang desa seringkali sangat bermanfaat. Infrastruktur yang dikembangkan masih belum dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga efektivitas pembangunan belum teruji. Karena masyarakat tidak dapat memanfaatkan hasil pembangunan, hal ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat suatu pembangunan bukan satu-satunya faktor yang menentukan efektivitasnya; Faktor lainnya meliputi kualitas infrastruktur fisik pembangunan, manfaatnya bagi masyarakat, dan pembangunan apa pun yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan pendapatan warga desa.

Desa Bonto-bontoa yang terletak sekitar 17 km dari kota Bantaeng berada dalam Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Secara geografis

Desa Bonto-Bontoa dikelilingi oleh perkebunan produktif. Masyarakatnya adalah sebagian besar petani dan peternak ayam. Jumlah penduduk Desa Bonto-bontoa adalah 1.784 jiwa. Apabila ditinjau dari letak geografis desa ini berbatasan dengan Kelurahan Banyorang disebelah barat, sebelah timur berbatasan dengan desa Benteng Malewang Gantarang, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Ereng-ereng, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pattallasang.

Mengingat letak geografis di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan pertanian dan infrastruktur desa yang tidak memadai menjadi penyebab utama permasalahan sosial. Masyarakat berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan yang ketinggalan jaman dan kurang berkembang terkait dengan buruknya infrastruktur, seperti kamar mandi yang kotor, jalan desa yang tidak beraspal, dan saluran pembuangan limbah rumah tangga yang tidak memadai.

Nurcholis (2011), hal. 104 Tujuan pembangunan yang didanai oleh uang desa seringkali sangat bermanfaat. Namun karena masih terdapat infrastruktur terbangun yang belum dimanfaatkan secara maksimal, maka manfaat pembangunan tersebut belum terlihat. Karena masyarakat tidak dapat memanfaatkan hasil pembangunan, hal ini dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat suatu pembangunan bukan satu-satunya faktor yang menentukan efektivitasnya; Faktor lainnya meliputi kualitas infrastruktur fisik pembangunan, manfaatnya bagi masyarakat, dan pembangunan apa pun yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan pendapatan warga desa.

Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur di desa tersebut menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat desa karena banyak membuka

lapangan pekerjaan karena dapat juga memberdayakan masyarakat setempat menjadi lebih sejahtera. Dari 100% kebijakan alokasi dana desa 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat desa, contoh dari pemberdayaan masyarakat desa di desa Bonto bontoa yaitu BUMDES dan pelatihan kelompok untuk masyarakat. Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan desa tentang lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur membuat masyarakat lebih terbantu misalkan dalam hal pembangunan jalan tani, bisa mempermudah petani mengakses jalan dengan mudah. Kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat agar lebih memfokuskan pada pembangunan fisik sehingga dapat bermanfaat dan banyak membuka lapangan pekerjaan. Hal ini dapat menjadikan masyarakat menjadi masyarakat desa yang sejahtera dan dapat membangun desanya menjadi desa yang sesuai dengan harapan setiap masyarakat desa. Hal yang membuat kepala desa untuk lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan pemberdayaan masyarakat. Di desa tersebut kepala desa siap mengalokasikan semua dana desa untuk pemberdayaan masyarakat jika memang masyarakatnya mau membuat suatu produk yang bisa mereka jadikan pendapatan selain hasil pertanian. Tapi sayangnya masyarakat desa disana kurang mental untuk bisa mewujudkan hal itu.

Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan non fisik juga perlu dalam sebuah desa akan tetapi, masyarakat yang masih kurang partisipasi dalam hal ini lebih mementingkan urusan pribadi dibanding harus ikut berpartisipasi dalam membangun desanya. Selain dalam hal pengalokasian kepala desa juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa melancarkan setiap urusan masyarakat desa tersebut, seperti kebijakan harus fleksibel artinya

dimanapun, kapan pun beliau akan melayani masyarakatnya jika memang masih bisa dilayani seperti dalam hal tanda tangan berkas. Dan juga pelayanan harus cepat agar setiap urusan yang mendesak bisa dikerjakan secepatnya tanpa mengulur waktu lagi

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimanakah Efektivitas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan informasi yang dikandungnya dapat membantu memperluas pengetahuan, khususnya dalam membuat konsep pembangunan infrastruktur desa dan pembangunan ekonomi. Selain itu, ini digunakan dalam penciptaan

teori-teori yang membahas perencanaan pembangunan.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan perspektif segar kepada mahasiswa mengenai perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa pada tataran kehidupan mahasiswa. Hal ini terutama berlaku ketika membahas topik perencanaan pembangunan, yang merupakan bidang studi yang menarik dan dapat memberikan informasi berharga tentang infrastruktur desa dan perencanaan pembangunan ekonomi. Sesuai Potensi dan Kondisi Kawasan Desa Bonto-Bontoa di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Efektivitas

Kata “efektif” (yang dapat menimbulkan dampak, pengaruh, akibat, atau membuahkan hasil) merupakan akar kata “efektivitas”. Efektivitas, dengan demikian, didefinisikan sebagai proaktif, membantu, dan konsisten dalam tindakan seseorang ketika melakukan tugas dengan tujuan yang diinginkan. Efektivitas pada dasarnya adalah ukuran seberapa baik hasil dicapai dan sering dikacaukan dengan efisiensi, padahal mempunyai arti yang berbeda. Efisiensi lebih fokus pada bagaimana membandingkan input dan output untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Efisiensi dalam mencapai tujuan sering dikaitkan dengan efektivitas secara umum. Menurut Peter F. Drucker yang dikutip dalam Sadono Sukirno (2004), efektivitas berarti melaksanakan tugas secara akurat. Dikatakan juga bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan manajemen dalam melaksanakan tugas yang diperlukan untuk memenuhi tujuan organisasi. Hal ini menyiratkan bahwa salah satu cara untuk mengevaluasi efektivitas seorang manajer dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan melihat seberapa banyak pencapaiannya dalam kaitannya dengan tujuan organisasi.

Efektivitas, dalam kata-kata Robbins dkk (2004), adalah melakukan tugas dengan benar atau menyelesaikan proyek yang secara langsung mendukung pencapaian tujuan organisasi. "Melakukan hal yang

benar" biasanya mengacu pada efektivitas, yaitu tindakan melakukan tugas yang secara langsung membantu bisnis dalam mencapai tujuannya. Efisiensi biasanya dikaitkan dengan efektivitas. Bekerja sesuai target atau menghasilkan output terbanyak dengan jumlah input paling sedikit adalah inti dari efisiensi.

2. Desa

a. Pengertian Desa

Kumpulan pemukiman di dalam wilayah desa adalah definisi umum dari desa. Kata "desa" mengacu pada pembagian wilayah administratif Indonesia menjadi kecamatan-kecamatan yang dikuasai oleh kepala desa.\.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, "desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki orientasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri (otomatis) dalam ikatan kesatuan Republik Indonesia". Lalu dijelaskan Kembali pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut "desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada didaerah Kabupaten".

Suatu kawasan pedesaan dicirikan oleh kegiatan ekonomi utamanya adalah pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam, dan pengaturan

perannya sebagai tempat pelayanan sosial, pelayanan pemerintah, dan penduduk pedesaan.

Menurut Jamaluddin (2015), desa adalah suatu wilayah yang ditentukan secara geografis dan dibentuk oleh faktor-faktor sosial-ekonomi, politik, dan budaya yang berinteraksi dan berdampak satu sama lain dengan wilayah di sekitarnya.

b. Unsur-Unsur Desa

Unsur Unsur desa adalah:

- 1) Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak beserta penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografi setempat.
- 2) Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, penambahan, kepadatan, persebaran dan mata pencaharian penduduk desa setempat.
- 3) Tata kehidupan, dalam hal ini pota tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-belik kehidupan masyarakat desa.

Ketiga komponen masyarakat tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, artinya merupakan suatu “satuan hidup” dan bukan suatu kesatuan yang berdiri sendiri. Tata ruang hidup yang dipikirkan dengan matang memastikan keharmonisan dan ketenangan di desa.

Pada kenyataannya, faktor manusia, upaya manusia, dan kondisi geografis menentukan ketiga variabel tersebut, yang mempengaruhi pertumbuhan atau kehancuran sebuah kota. Jika ada “usaha

manusia” yang dilakukan untuk memanfaatkan wilayah tersebut, maka hal ini akan mempunyai arti penting bagi masyarakat.

Karena keunikan "lingkungan geografis" dan "usaha manusia" di setiap desa, tingkat kemajuan dan kekayaan penduduknya berbeda-beda. Komponen lokasi adalah komponen lain yang ada di desa. Sebuah desa biasanya terletak jauh dari kota atau daerah berpenduduk lainnya. Pergi ke desa-desa atau mampir ke desa-desa di medan yang damai dan monoton. Potensi pembangunan yang lebih besar terdapat di desa-desa yang dekat dengan kota dibandingkan dengan desa-desa yang letaknya jauh di dalam kota.

Derajat keterasingan antara suatu tempat dengan kawasan lain ditentukan oleh unsur lokasi. Desa yang jauh dari batas kota mempunyai lahan yang luas yang digunakan untuk pertanian. Hal ini disebabkan karena lahan tersebut lebih banyak digunakan untuk tanaman komersial dan kebutuhan pokok dibandingkan untuk rumah atau bangunan.

c. Fungsi Dan Potensi Desa

Desa mempunyai potensi kegunaan dan fungsi sebagai berikut: Pertama, desa berfungsi sebagai “hinterland” atau kawasan pendukung kota, menyediakan bahan pangan pokok seperti jagung dan singkong serta bahan pangan tambahan seperti kacang-kacangan, kedelai, buah-buahan, dan bahan pangan lainnya. barang yang berasal dari hewan.

Kedua, dusun ini dilihat dari potensi ekonominya yang besar sebagai tempat penimbunan tenaga kerja dan komoditas mentah.

Ketiga, komunitas dapat diklasifikasikan menjadi komunitas industri, manufaktur, perikanan, pertanian, atau kombinasi dari ketiganya berdasarkan jenis pekerjaan yang mereka lakukan.

Desa mempunyai potensi fisis dan potensi non fisis antara lain:

- 1) Tanah, dalam arti sumber tambang dan mineral, sumber tanaman yang merupakan sumber mata pencaharian dan penghidupan.
- 2) Air dalam arti sumber air, keadaan atau kualitas air dan tata airnya untuk kepentingan irigasi, pertanian dan keperluan sehari-hari.
- 3) Iklim, yang merupakan peranan bagi desa agraris.
- 4) Ternak, dalam artian fungsiternak didesa sebagai sumber tenaga, sumber bahan makan dan sumber keuangan,
- 5) Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah tanah dan sebagai produsen.

Potensi nonfisis meliputi antara lain:

- 1) Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling pengertian.
- 2) Lembaga-lembaga sosial, Pendidikan dan organisasi- organisasi sosial desa yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.
- 3) Aparatur atau pamong desa yang kreatif dan berdisiplin sumber kelancaran dan tertibnya pemerintahan desa.

Setiap desa mempunyai potensi yang unik karena perbedaan letak geografis, komposisi penduduk, luas lahan, jenis tumbuhan, dan

tingkat kesuburan tanah. Variasi dalam proses dan pasokan air menyebabkan variasi pola biologis dan adaptasi.

Keadaan demografis yang berbeda dan dasar-dasar kehidupan desa memunculkan ciri-ciri yang berbeda dan tingkat pembangunan desa yang berbeda-beda, termasuk:

- 1) Desa yang kurang berkembang atau terbelakang.
- 2) Desa yang sedang berkembang.
- 3) Desa berkembang atau desa maju.

Maju mundurnya suatu desa dapat tergantung pada beberapa faktor antara lain disebutkan disini:

- 1) Potensi desa yang mencakup potensi sumber daya alam dan potensi penduduk warga desa beserta pamongnya.
- 2) Interaksi antara desa dengan kota, antara desa dengan desa tercakup didalamnya perkembangan komunikasi dan transportasi.
- 3) Lokasi desa terhadap daerah-daerah disekitarnya yang lebih maju.

d. Anggaran Pendapatan dan belajar desa (APBDesa)

Undang-Undang Desa yang disahkan pada tahun 2014 membawa perubahan pada struktur tata kelola pemerintahan desa, khususnya di bidang pengelolaan keuangan. Konstitusi Desa dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat desa melalui peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dikenal dengan dana desa, dialokasikan dalam Undang-Undang Dasar Desa, yang

secara signifikan memperkuat keuangan masyarakat.

Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa. Mereka digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai Pasal 1 Angka 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebanyak 10% dari total dana yang masuk ke daerah diperuntukkan bagi anggaran desa yang akan dibiayai secara bertahap sesuai kemampuan APBN. Dana desa dikelola dengan mengedepankan keadilan dan kepatuhan, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, tertib, sesuai peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintah kabupaten/kota bertugas mengawasi keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa dalam APBN sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan. Terdapat kesalahpahaman di masyarakat mengenai perbedaan dana desa (ADD) dan dana desa (DD). Desa ke Negara Bagian. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa mengatur tentang prioritas penggunaan DD. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengalokasikan anggaran Desa, yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang keduanya merupakan komponen dari Dana Perimbangan. Setiap tahunnya, setiap Kabupaten/Kota menerima 10% dari total jumlah ADD (Kemendes PDTT, 2016).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (2014) “dana desa adalah uang yang diperoleh dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota dan digunakan untuk membiayai pembangunan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan administrasi pemerintahan”.

Perhitungan anggaran didasarkan pada jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan topografi. Karena keuangan desa menjadi perhatian utama dalam undang-undang desa, diperlukan pengawasan dan arahan dalam melaksanakan kegiatan desa di bawah pemerintahan desa (Prabawa, 2016).

Spesifikasi Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan besaran Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota. Peraturan yang ditetapkan oleh bupati atau walikota mengatur bagaimana dana daerah disalurkan dan berapa jumlah yang disalurkan ke setiap kota. Berdasarkan alokasi pokok dan formula alokasi, kabupaten dan kota menentukan berapa besaran

Dana Desa yang dialokasikan ke setiap desa. Dengan membagi alokasi dasar setiap kabupaten atau kota dengan jumlah desa di kabupaten atau kota tersebut, maka besarnya alokasi dasar setiap desa dapat ditentukan.

Besaran Alokasi Formula setiap desa, dihitung dengan bobot sebagai berikut:

- a) 25 % (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
- b) 35 % (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
- c) 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah;
- d) 30 % (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Jumlah penduduk desa yang miskin dan Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) masing-masing menunjukkan tingkat kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografisnya. IKG Desa dipengaruhi oleh beberapa variabel, antara lain aksesibilitas transportasi, kondisi infrastruktur, dan penyediaan layanan penting.

b. Tujuan Dana Desa

Secara umum, inisiatif pemerintah harus terdefinisi dengan baik dan berdampak positif pada masyarakat. Pada dasarnya, tujuan utama pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan taraf hidup di pedesaan dengan mewujudkan kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan bagi seluruh anggota masyarakat dan persamaan hak.

Singkatnya, tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai dimensi.

Tujuan dari dana desa dari kementerian keuangan RI yaitu:

- a) Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b) Mengentaskan kemiskinan
- c) Memajukan perekonomian desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

c. Sumber Dana Desa

Masyarakat desa kini memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mengatur pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan mengurus urusan mereka sendiri berkat UU Desa. Selain meningkatkan kekuasaannya, desa juga diberikan sumber pendapatan.

UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa: Hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- 2) Dana Desa dari APBN
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota
- 6) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- 7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah

d. Pengawasan Dana Desa

Baik BPD maupun masyarakat desa melakukan pengawasan berbasis desa. Pihak kecamatan akan mengawasi penggunaan uang desa di setiap dusun. Setiap tahunnya, inspektorat dari Kabupaten akan melakukan audit. Demikian pula, pemeriksaan tahunan akan dilakukan oleh BPK yang beroperasi di luar pusat. Kelebihan tahunan anggaran desa yang disebut juga dengan kelebihan sisa Pembiayaan Anggaran Tahunan Berjalan (SILPA) yang tidak tersedia untuk digunakan pada tahun berjalan.

e. Peraturan Dana Desa

Adapun Peraturan Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- 3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN.
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usuk dan Kewenangan Lokasi Berskala Desa.
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

7) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 6 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi.

10) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

f. Prinsip-Prinsip Dalam Pelaksanaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan dana desa maka harus memperhatikan prinsip-prinsip dibawah ini:

1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.

2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung

dengan kepentingan sebagai besar masyarakat desa.

3) Tipologi desa, dengan memperhatikan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan antara perkembangan dan kemajuan desa.

g. Tanggung Jawab Dana Desa

Akuntabilitas keuangan desa dan pengelolaan keuangan desa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan; kepala desa sebagai orang yang mempunyai kewenangan mengelola uang desa bertanggung jawab terhadap kedua hal tersebut. Sesuai peraturan desa, kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban dan melampirkannya:

1. Format laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBD desa tahun anggaran berkenaan.
2. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan
3. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk kedesa.

h. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa meliputi dua tahap yaitu penyaluran dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dari RKUD ke Rekening Kas Daerah (RKD). Penyaluran dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus).

2) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I disalurkan setelah direktur jenderal perimbangan keuangan menerima laporan dari bupati/walikota mengenai realisasi penyaluran dan pemantapan penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya, serta peraturan daerah. mengenai APBD kabupaten/kota tahun anggaran berjalan, tata cara penyaluran dan penetapan rincian dana desa setiap desa.

Pengalokasian dana desa tahap II dilakukan menyusul Menteri C.Q. Bupati/walikota melaporkan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I yang menunjukkan minimal 50%. Bupati/wali kota menerima keuangan desa tahap I berupa pembayaran dari kepala desa dan disalurkan ke RKD.

1) Peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

2) Laporan realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya.

Dana desa tahap II disalurkan setelah bupati/walikota menerima laporan dari kepala desa yang menyatakan bahwa dana desa tahap I telah terpakai paling sedikit separuhnya. Karena sebagian desa terpencil dalam hal ini belum terlayani jasa perbankan, maka bupati atau walikota dapat menggunakan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada menteri c.q. untuk lebih mengontrol distribusi

pendapatan desa dari RKUD ke RKD. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

4. Pembangunan

Pembangunan, dalam arti dinamis, merupakan proses pengarahan dan aktivitas perusahaan yang tiada akhir. Salah satu aspek pembangunan adalah pergeseran sosial ekonomi. Pembangunan dapat menjadi suatu proses yang bergerak maju atau bergantung pada masyarakat dan struktur sosial mereka untuk menjadi kuat dengan sendirinya. Laju perekonomian suatu negara dan suatu wilayah/desa dapat meningkat seiring dengan pembangunan. Hal ini mempunyai kekuatan untuk mengubah pengaturan perekonomian yang ada saat ini. Alasan di atas sejalan dengan pernyataan Subandi (2011) bahwa reformasi kelembagaan atau reformasi peraturan, serta perubahan struktur ekonomi—dari pertanian ke industri atau jasa—adalah penting dalam proses pembangunan. Bagi kota-kota yang belum terbentuk atau masih berkembang, pembangunan terencana dianggap sebagai pendekatan yang lebih logis dan sistematis. Pembangunan menurut Easton (2016) adalah upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan secara metodis mengaktualisasikan potensi yang telah ada.

a. konsep Dasar Perencanaan Pembangunan

Pembangunan dan perencanaan saling bergantung dan membentuk satu kesatuan. Langkah pertama dalam proses pembangunan disebut perencanaan pembangunan, dan ini berfungsi sebagai sumber informasi, arahan, atau kerangka dasar untuk melaksanakan rencana aksi atau tugas perencanaan lainnya. Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya

berbasis penelitian karena dalam proses pelaksanaannya digunakan metode penelitian tambahan, seperti studi lapangan, analisis data, dan teknik pengumpulan data, untuk memperoleh data yang dapat dipercaya, baik data konseptual maupun data aktual. informasi percobaan yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan baku proses perencanaan pembangunan yang sebenarnya (Kusumah dan Suoriady, 2003).

b. Pembangunan Daerah

Yang dimaksud dengan “pembangunan daerah” adalah segala upaya pembangunan, termasuk dan tidak termasuk “urusan rumah tangga daerah”, yang mencakup berbagai sumber pendanaan baik dari masyarakat maupun pemerintah (APBN dan APBD).

Kunarjo (2002) Sumber pembiayaan inisiatif pembangunan pemerintah adalah sebagai berikut: (a) Pemerintah Pusat yang menjalankan prinsip dekonsentrasi; (b) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Desa, yang melaksanakan tugas desentralisasi dan bantuan. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan usaha berbasis masyarakat lainnya merupakan beberapa inisiatif pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pemerintah biasanya menyerahkan tanggung jawab kepada sektor swasta untuk menciptakan sektor ekonomi modern, dengan menggunakan upaya pembangunannya terutama untuk menyediakan infrastruktur guna mendukung kegiatan ekonomi. Selain itu, pemerintah daerah harus aktif mengadopsi prinsip desentralisasi dalam rangka melaksanakan rencana atau program pembangunan daerah.

c. Pembangunan Desa

Menurut Nurman (2015:241) Inisiatif pemerintah dan masyarakat yang menyentuh seluruh aspek kehidupan dan penghidupan dikenal dengan istilah pembangunan desa (community development) dan pengembangan masyarakat desa (rural development). Menurut Nurcholis (2011:106), dalam membangun Desa, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan bagaimana proyek-proyek tersebut akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Desa. Contoh proyek-proyek ini termasuk pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, pintu air, saluran tersier dan sekunder, serta pasar, perkampungan, pembangunan tempat ibadah, dan sarana pendidikan seperti TPA, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.

d. Faktor- faktor yang mempengaruhi pembangunan

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam proses pengembangan; Pada akhirnya, jumlah sumber daya manusia yang dikembangkan untuk melaksanakan proses pembangunan akan menentukan sejauh mana proses tersebut dapat berjalan.

2) Sumber daya alam

Mayoritas negara-negara berkembang bergantung pada sumber daya alam untuk melaksanakan proses pembangunan mereka. Namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan suatu proses pembangunan ekonomi jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia.

Sumber daya alam yang dimaksud adalah kekayaan laut, kekayaan hasil hutan, pertambangan, kekayaan mineral, dan kesuburan tanah.

3) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, sehingga mendorong proses dan mengubah pola.

Mesin-mesin canggih telah mengambil alih tugas-tugas yang dahulunya diselesaikan oleh tangan manusia, sehingga berdampak pada kuantitas, kualitas, dan efisiensi sejumlah kegiatan pembangunan ekonomi.

4) Budaya

Unsur-unsur budaya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan caranya yang unik; mereka dapat bertindak sebagai katalis atau generator kemajuan. Sikap ketekunan dan kecerdasan, integritas dan ketekunan merupakan komponen budaya yang dapat mendorong kemajuan. Budaya yang menghambat kemajuan antara lain yang memiliki sikap KKN, ideologi anarkis, serta perilaku egois dan boros.

5) Sumber Daya Modal

Untuk mengelola sumber daya alam dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sumber daya modal manusia. Karena barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas, maka sumber daya modal dalam bentuk barang modal sangat penting bagi pertumbuhan dan kelancaran pembangunan ekonomi.

5. Transparansi

Transparansi Yang dimaksud konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Hari Sabarno (2007: 38) bahwa: “Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.”

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintahan harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk di sembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara

musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

6. Infrastruktur

Sarana dan prasarana umum termasuk dalam definisi infrastruktur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fasilitas umum meliputi telepon, jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas sanitasi. Dalam bahasa ilmu ekonomi, infrastruktur merupakan salah satu jenis modal publik yang dihasilkan dari investasi pemerintah. Jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan merupakan contoh infrastruktur dalam penelitian ini (Mankiw, 2013).

Sementara itu, Kuncoro (2014:20) mendefinisikan infrastruktur sebagai sistem fisik yang menyediakan bangunan, air, transit, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk mendukung kebutuhan mendasar masyarakat pada tingkat ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik mengacu pada pertumbuhan yang langsung dirasakan oleh masyarakat atau pembangunan yang menarik secara visual. Contoh jenis pembangunan ini antara lain gedung-gedung publik, prasarana, dan fasilitas lainnya. Infrastruktur merupakan salah satu komponen kunci yang mendorong pembangunan dan kemajuan ekonomi. Penyediaan infrastruktur yang memadai sangatlah penting. Komponen penting dari sistem pelayanan publik adalah infrastruktur fisik, yang sering disebut dengan fasilitas. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk memungkinkan masyarakat mewujudkan hak-hak dasar mereka, yang mencakup akses terhadap makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Dengan demikian, infrastruktur dapat diartikan sebagai modal yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat dalam rangka menunjang berbagai aktivitas. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Padahal masyarakat desa pada akhirnya harus merasakan dampak dari pembangunan tersebut agar dapat mengangkat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Hal ini krusial dan perlu, seperti halnya pembangunan infrastruktur di Desa Bonto-Bontoa. Peneliti menemukan di lapangan bahwa pembangunan infrastruktur Desa Bonto-Bontoa masih memerlukan sarana dan prasarana. Pembangunan di bidang infrastruktur sangatlah penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan kemampuan mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penciptaan sarana dan prasarana desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan pemanfaatan lingkungan secara bertanggung jawab. dan sumber daya alam. Badan Penelitian dan Pengembangan Dalam Negeri juga mengatakan hal serupa. Pembangunan prasarana dan sarana fisik sesuai rencana, berupa alat atau fasilitas yang manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat, yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan
2. Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan

3. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.

B. Tinjauan Empiris

Beberapa penelitian tentang dana desa yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan skripsi Ekonomi yang menjadi referensi penulis dalam menyelesaikan Proposal ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama (tahun)	Judul Penelitian	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Sari (2017)	Efektivitas Kebijakan Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur pedesaan di Kabupaten Langkat	Data primer dan sekunder	Penambahan sarana dan prasarana fisik dipedesaan isolating kebijakan dana desa memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan. However, there are more and more people who are aware that the masyarakat's income is not increasing and that this is not due to the presence of a desa that is a result of the community's own economic activities. The results of this study indicate that the alkasi and desa have a positive relationship with the desa construction in the Stabat neighborhood, and the general public's perception of the alkasi and desa has a significant negative impact on the desa construction in the Stabat neighborhood.
2.	Dini (2010)	Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alkasi dan desa

		Pembangunan Desadi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat		mempunyai hubungan yang positif terhadap pembangunan desa di lingkungan Stabat, dan persepsi masyarakat umum terhadap alkasi dan desa mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap pembangunan desa di lingkungan Stabat
3.	Tumbel (2014)	Analisis Bantuan Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan)	Penelitian Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuandes dan pembangunan desa terdapat hubungan yang signifikan dan erat.
4.	Nova Sulasri (2016)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa Lakopodo Kecamatan Waropute Kabupaten Muna	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses Alokasi Dana Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dikatakan cukup efektif. Partisipasi masyarakat sangat rendah akibat buruknya transparansi informasi yang dikirimkan perangkat Desa Lakapodo kepada masyarakat Desa Lakapodo.
5.	Ihdina Dewi (2021)	Efektivitas dana desa bagi pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa bonto jai kecamatan Bissappu di kabupaten Bantaeng	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Program pembangunan ekonomi dan infrastruktur Desa Bonto Jai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tampaknya berjalan cukup baik berdasarkan tiga indikator efektivitas. Yang pertama adalah pencapaian tujuan, yang menunjukkan bahwa seluruh komponen program dilaksanakan

				dan diselesaikan sesuai jadwal dan sesuai anggaran; kedua adalah integrasi, yang menunjukkan bahwa program telah diintegrasikan ke dalam musyawarah desa sebelum program dilaksanakan; dan ketiga adaptasi, yang menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program di lapangan telah dilakukan secara bertahap dan sesuai ketentuan.
6	Ahid Papareng (2019)	Efektivitas dan efisiensi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep	Kualitatif Komparatif	Tiga desa—Desa Pamolokan, Desa Pandian, dan Desa Pangarangan telah menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan Pemerintah Desa dalam mengelola sumber daya Alokasi Dana Desa secara efektif dan mengoptimalkan kebutuhan masyarakat..
7	Aria Nugraha (2019)	Analisis efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDeS) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016- 2018	Penelitian Deskriptif, Metode pengumpulan data : Dokumentasi	Persoalannya, terdapat kecenderungan tujuan dan realisasi program APBDes yang berbeda-beda dari tahun ke tahun. Hal ini cukup menjadi bukti bahwa kedewasaan masyarakat sebagai subjek dan objek program masih kurang.
8	Umi Yuniarti (2015)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDes)	Kualitatif deskriptif	Berdasarkan hasil analisis Berdasarkan efektivitas dan efisiensi APBDes Desa Argodadi tahun anggaran 2010–2013, dapat disimpulkan bahwa

				meskipun kriteria tersebut kurang efektif pada tahun 2013, namun kinerja keuangan pada tahun 2010–2012 cenderung tidak efisien. Selain itu, kinerja keuangan secara keseluruhan tidak efisien, dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 103,12%, lebih tinggi dari 100%. Dengan rata-rata efektivitas sebesar 123,75%, kinerja keuangan tahun 2010 hingga 2013 cenderung cukup efektif.
9	Luthfiani et al., (2020)	Analisis Faktor–faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Lombok Tengah	kuantitatif deskriptif	Meskipun peraturan perpajakan bendahara daerah dan kepatuhan perpajakan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kompetensi perangkat desa dan keterlibatan masyarakat tidak banyak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
10	Aprilya & Fitria (2020)	Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	data primer	Karena pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dengan kemampuan dan pengalaman yang memadai dalam mengelola dana, maka kompetensi aparatur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh komitmen organisasi. Penanganan dana daerah tetap akuntabel meski ada transparansi. Partisipasi masyarakat tidak ada

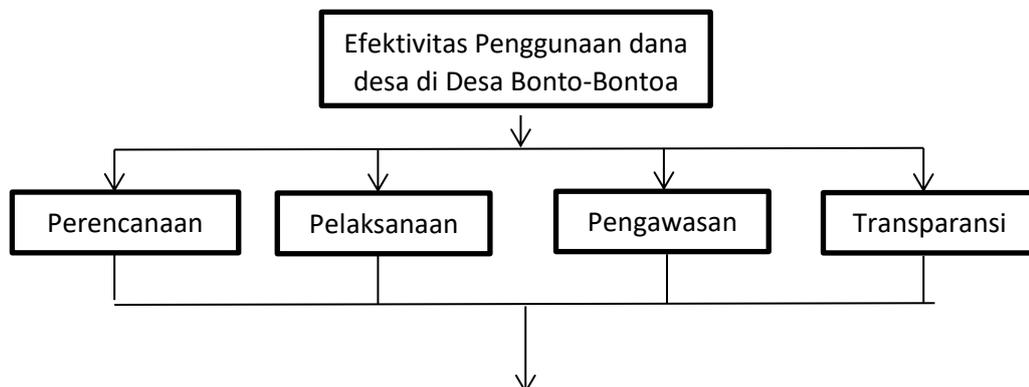
				pengaruhnya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
--	--	--	--	---

C. Kerangka Pikir

Dana desa di Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng menjadi subjek penelitian ini. Mencari pendanaan desa untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi merupakan tujuan khusus penelitian ini.

Berdasarkan penelitian tersebut, maka perlu dilakukan analisis terhadap gambaran perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan transparansi dana desa guna menilai efektivitas dana desa yang diberikan kepada Desa Bonto-bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Di Desa Bonto-bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, keberhasilan dana desa dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan, penurunan angka kemiskinan, dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng mengembangkan infrastrukturnya dengan mengkaji bagaimana pendapatan meningkat, bagaimana kemiskinan dikelola, dan bagaimana peningkatan infrastruktur tersedia setelah pembentukan dana desa. Hal ini akan memungkinkan berkembangnya wilayah di Desa Bonto-Bontoa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 ini



Ketersediaan
Infrastruktur Yang
Lebih Baik

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Saya mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai segala jenis penelitian yang menggunakan sistem deskriptif dengan tujuan menganalisis data. Selain itu, teori terhadap data dijelaskan dalam penelitian kualitatif, yang diakhiri dengan dukungan teori yang sudah ada sebelumnya. Metode deskriptif ini digunakan untuk menyelidiki secara akurat dan tepat fakta-fakta atau ciri-ciri suatu populasi tertentu dalam hal ini suatu bidang dengan cara yang metodis dan akurat. Metode deskriptif pada dasarnya mencari teori, bukan menguji teori. Pendekatan ini menekankan pada observasi dan lingkungan sekitar.

Analisis yang dilakukan tanpa menggunakan model statistik, matematika, atau model ekonometrik khusus lainnya dikenal sebagai penelitian kualitatif. Hanya prosedur pemrosesan data, seperti memverifikasi data tabular dalam hal ini, sekadar membaca tabel, grafik, atau statistik yang tersedia lalu menguraikan dan menafsirkannya yang digunakan untuk analisis data. Sugiono (2003) mendefinisikan data kualitatif sebagai informasi yang berbentuk kata, kalimat, diagram, atau gambar. Angka-angka atau data kualitatif yang dirangkum merupakan contoh data kualitatif. Misalnya, skala pengukuran berisi data kualitatif (skor) yang digunakan.

B. Fokus Penelitian

Tujuan penelitian sejalan dengan fokus penelitian kualitatif ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kelayakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu

Kabupaten Bantaeng, guna menilai kelayakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan perekonomian.

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian ini dipilih dengan pertimbangan bahwa di Desa Bonto-bontoa merupakan salah satu desa dari 46 desa di Kabupaten Bantaeng yang dimana dana desa Bonto-Bontoa merupakan salah satu desa penerima dana terbanyak.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini kurang lebih 2 bulan (Maret - April 2024)

D. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yaitu :

1. Jenis Data.

Dalam penelitian ini, data primer dan sekunder merupakan dua kategori data yang digunakan. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan. penelitian langsung melalui pemeriksaan laporan kerja dan dapat diperoleh dari setiap informan yang dilihat atau diajak bicara di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan dan diperoleh melalui buku-buku ilmiah, dokumen, tesis, jurnal, dan sumber-sumber lain yang merupakan produk akhir dari pengolahan data asli dan pendukung penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu kegiatan wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan dengan

struktur yang jelas. Penanya tidak akan menanyakan apa pun selain daftar pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti nantinya, daftar pertanyaan inilah yang akan menjadi pertanyaan dalam proses wawancara yang dilakukan dengan informan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber perpustakaan, badan pusat statistik dan publikasi resmi pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Informan

Pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis telah menyediakan data untuk penelitian ini. Purposive sampling, atau metode pengambilan sampel dengan sengaja, adalah metodologi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk memilih responden atau informasi. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti memilih sampel karena beberapa faktor yang berbeda. Jadi, peneliti sendiri yang memilih sampelnya; itu tidak dipilih secara acak. Dalam hal ini, peneliti akan memilih delapan informan untuk penelitian ini yang dianggap memenuhi syarat untuk menyediakan data yang dibutuhkan. Adapun daftar informannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Daftar Informan

No	Informan	Keterangan	Jumlah
1	Kepala Desa	Informan utama	1
2	Kaur Perencanaan	Informan Utama	1
3	Tokoh Masyarakat Dan Masyarakat	Informan Tambahan	3
		Jumlah	5

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung ke desa di Kabupaten yang menjadi subjek penelitian.
2. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa yang bersamaan dengan pengisian kuesioner.
3. Dokumentasi, yaitu catatan atau dokumen resmi tertulis serta foto pengisian kuisisioner dengan pihak-pihak yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa ada dua masalah yang sedang dipertimbangkan, pendekatan deskriptif analitik yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data secara metodis, mengevaluasi dan menafsirkan data dengan menggunakan foto. Tugas analisis data mencakup, misalnya:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Karena banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, maka data tersebut harus didokumentasikan dengan cermat dan menyeluruh. Semakin lama peneliti berada di lapangan, datanya akan semakin rumit dan beragam. Oleh karena itu, reduksi data harus digunakan untuk memulai analisis data segera. Mereduksi data berarti menyaring informasi, menginvestigasi poin-poin penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, menghilangkan informasi yang berlebihan, dan mengatur data sehingga kesimpulan dapat dibuat dan divalidasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menampilkan data sebagai kumpulan informasi yang terorganisir secara lebih sistematis, memungkinkan adanya potensi untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan, merupakan fase krusial kedua dari operasi analisis data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, antara lain diagram alur, infografis, korelasi antar kategori, dan deskripsi ringkas. Teks naratif adalah format yang paling umum digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini, data akan disajikan secara tekstual oleh peneliti; namun demikian, tabel atau gambar dapat membantu memperjelas temuan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*)

Intinya, menarik kesimpulan adalah proses memberikan konteks pada fakta yang dikumpulkan. Oleh karena itu, sejak data pertama dikumpulkan, para akademisi telah berupaya menafsirkan informasi dengan mencari tema, korelasi, pola, model, proses sebab-akibat yang berulang, dan elemen lainnya. Meskipun kesimpulannya masih ambigu pada awalnya, hal ini pada akhirnya akan menjadi semakin jelas seiring dengan semakin banyaknya data yang dikumpulkan untuk mendukung tahap selanjutnya. Verifikasi kesimpulan juga dilakukan selama penelitian. Singkatnya, untuk membentuk keyakinan tentang kebenaran interpretasi yang diperoleh dari data, interpretasi tersebut harus diperiksa kebenaran, kekokohan, dan kesesuaiannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

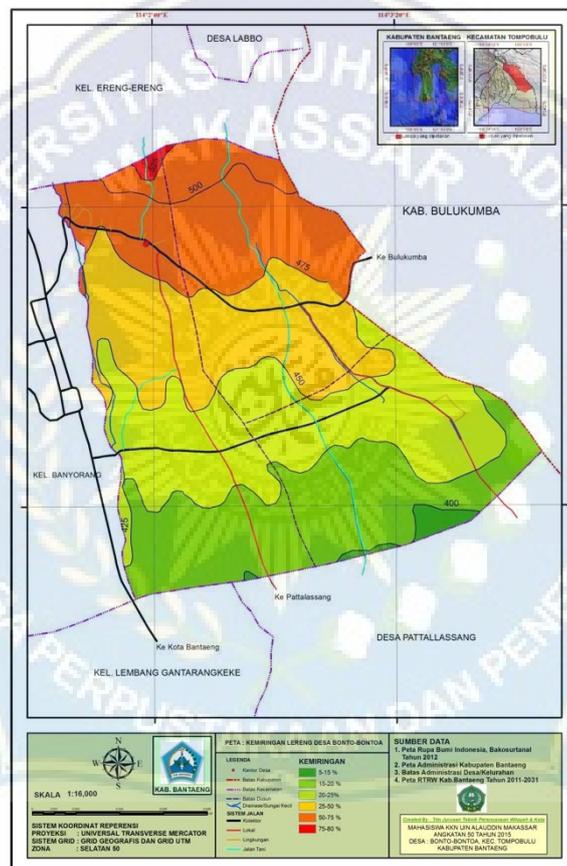
A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 120 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Bantaeng terletak pada 050 21'15" LS sampai 050 34'3" dan 1190 51'07" BT sampai 1200 51'07" BT. Luas wilayah kabupaten Bantaeng sekitar 395,83 Km² yang secara administrasi terdiri dari 8 kecamatan dengan 67 kelurahan/desa. Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terdiri dari 3 kecamatan tepi pantai (Kecamatan Bissappu, Bantaeng dan Pa'jukukang), dan 5 Kecamatan bukan pantai (kecamatan Uluere, Sinoa, Gantarangkeke, Tompobulu dan Eremerasa). Dengan perincian 17 desa/kelurahan pantai dan 50 desa/kelurahan bukan pantai.

Desa Bonto-Bontoa merupakan salah satu wilayah yang berada dalam lingkup administratif yang berada pada dataran rendah dengan luas 4,09 Km². Wilayah Desa Bonto-Bontoa merupakan lingkup kawasan Kabupaten Bantaeng dengan lokasi yang strategis karena berada di antara Pegunungan dan perairan sehingga memberi pengaruh terhadap percepatan pembangunan di wilayah ini. Secara geografis Desa Bonto-Bontoa terletak pada 05-°26'40" LS sampai 05°27'30" LS dan 114°2'40" BT sampai 114°3'20"BT. Dalam orientasi wilayah Kecamatan Tompobulu, Desa Bonto-Bontoa merupakan wilayah dengan luas yakni memiliki persentase 5,31% dari total luas wilayah Kecamatan Tompobulu. Secara administratif, wilayah Desa Bonto-Bontoa memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut;

- Sebelah utara : Kelurahan Ereng-Ereng
- Sebelah timur : Desa Benteng Malewang Gantarang
- Sebelah selatan : Desa Pattalassang
- Sebelah barat : Kelurahan Banyoran

Secara Administratif Desa Bonto-Bontoa terbagi menjadi 3 Dusun, 7 RW, 14 RT



Gambar 4.1 Peta Desa Bonto Bontoa

a. Visi dan misi desa Bonto Bontoa

1. visi

- Desa Bonto Bontoa menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah, jujur dan bertanggung jawab dengan melibatkan unsur masyarakat desa Bonto Bontoa dalam membangun secara adil, aman, mandiri dan transparan

2. misi

- Melakukan reformasi system kerja aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang prima
- Menyelenggarakan oemerintah yang bersih, bebas dari korupsi dan bentuk peneyelewangannya lainnya secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan UU
- Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembentukan kelompok usaha Bersama yang produktif dengan melakukan pendampingan penyuluhan khusus kepada UMKM, wiraswasta, petani dan pertukangan sesuai dengan potensi desa dan peluang pasar sehingga tercipta desa mandiri
- Membenahi bumdes sebagai lembaga yang mengelolah produktifitas masyarakat
- Membangun pola kehidupan masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sehat melalui peningkatan kualitas kegiatan posyandu balita, posyandu lansia kebersihan lingkungan dan pembangunan rumah layak huni dengan skala prioritas, yang disingkronkan melalui program kerja pkk

- Mengorganisir kaum remaja desa Bonto Bontoa dan meningkatkan perannya sebagai kader pembangun dan kader pemimpin masa depan terutama pembenahan struktur karang taruna, remaja masjid, dan majelis tadzlim sekaligus mengadakan kegiatan pengajian keagamaan agar tercipta semua kegiatan baik kegiatan kenegaraan seperti 17 Agustus maupun kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj terutama pembinaan regenerasi khatib dan imam masjid.
- Membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan formal dilingkup eksternal dan internal guna menunjang mutu pendidikan regenerasi desa Bonto Bontoa untuk menjadi individu yang berketuhanan, bermoral, berpengetahuan luas dan mandiri dalam meningkatkan sumber daya masyarakat.
- Menjalin kerja sama dan meningkatkan komunikasi dengan semua pihak seperti BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Pemuda sebagai mitra kerja untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap berkordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa
- Pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dalam desa Bonto Bontoa berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat seperti irigasi, sumber air bersih dengan melibatkan semua unsur untuk berperan aktif dalam pemeliharaan dan pemanfaatannya
- Meningkatkan potensi olahraga dan melakukan pembenahan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga sesuai kebutuhan dan potensi yang ada

- Memberdayakan pemerintahan dusun, rt dan rw secara professional dan proporsional dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bantuan pemerintah pusat dan daerah yang tepat sasaran yang pendataannya dan dikordinir mulai dari rt rw, kepala dusun dan dilaksanakan secara akurat dan transparan sesuai dengan kenyataan yang ada

b. kondisi demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Laju pertumbuhan adalah angka yang menunjukkan persentase pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk per kilometer persegi (bps, 2021)

Jumlah penduduk Desa Bonto Bontoa pada tahun 2023 sebanyak 2.017 jiwa. Jumlah penduduk setiap dusun dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1 jumlah penduduk

Jenis	Jumlah Penduduk Tahun 2023
Perempuan	925
Laki-Laki	1092
Jumlah	2.017

Sumber: Desa Bonto Bontoa

c. Sarana dan prasarana

Kondisi Desa Bonto Bontoa dapat digambarkan berdasarkan sarana dan prasarana yang ada. Untuk menggambarkan kondisi tersebut dapat dilihat pada table 4.2

Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
Asat Prasarana Umum		
a. Jalan	6,36	km
b. Jalan setapak	1,809	Km
c. Jembatan	3	Unit
Aset Prasarana Pendidikan		
a. Gedung Paud	1	Unit
b. Gedung TK	0	
c. Gedung SD	3	Unit
d. Taman Pendidikan Alqur'an	1	Unit
Aset Prasarana Kesehatan		
a. Posyandu	3	Unit
b. Polindes	3	Unit
c. MCK	7	Unit
d. sarana Air Bersih	3	Unit
Aset Prasarana Ekonomi		
a. Pasar Desa	1	Unit

Sumber : Desa Bonto Bontoa

Berdasarkan table 4.2 dapat diketahui bahwa sarana Pendidikan yang ada di Desa Bonto Bontoa berjumlah 5 buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMP/MTS dan seterusnya penduduk Desa Bonto Bontoa harus mencari sekolah di luar Desa Bonto Bontoa.

B. Hasil Penelitian

1. Program yang Terealisasi

Berikut ini adalah program pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Desa Bonto Bontoa yang terealisasi tahun 2019-2023 yang dananya bersumber dari Dana Desa yaitu:

Tabel 4.3 Program Pembangunan Infrastruktur di desa bonto bontoa

No	Program	Lokasi	Anggaran	%
1	Pembangunan Drainase	Dusun Bulu-Bulu	116.459.000	16,79
2	Pembangunan Talud	Dusun Bulu-Bulu	10.342.000	1,49
3	Pembangunan Darinase	Dusun Bulu-Bulu	23.441.000	3,38
4	Pembangunan Jalan Pemukiman	Dusun Bulu-Bulu	34.037.000	4,91
6	Pembangunan Jalan Tani	Dusun Bulu-Bulu	19.519.000	2,81
7	Pembangunan Drainase	Dusun Bonto-Bontoa	112.082.000	16,16
8	Pembangunan Drainase	Dusun Bonto-Bontoa	111.242.000	16,04
9	Pembangunan Drainase	Dusun Taricco	67.268.000	9,70
10	Jalan Pemukiman	Dusun Taricco	21.141.750	3,05
11	Pembangunan Jalan Pemukiman	Dusun Taricco	9.809.000	1,41
12	Pembangunan Darinase	Dusun Bonto-Bontoa	157.859.000	22,76
13	Pembangunan Talud	Dusun Bulu-Bulu	10.284.000	1,48
Total Anggaran			693.483.750	100,00

tahun 2019

Sumber: Desa Bonto Bontoa

Dapat di lihat dari tabel 4.3 pada tahun 2019 ada 13 pembangunan infrastruktur di desa Bonto Bontoa dengan total pengeluaran anggaran dana desa sebesar Rp.693.483.750 dengan pembangunan drainase menjadi

penggunaan anggaran terbesar di tahun 2019 dengan total Rp.157.859.000. ini menjadikan pembangunan di tahun 2019 menjadi pembangunan terbanyak di Desa Bonto Bontoa.

Tabel 4.4 Program Pembangunan Infrastruktur di desa bonto bontoa

No	Program	Lokasi	Anggaran	%
1	Jembatan	Dusun Bulu-Bulu	60.763.000	12,48
2	Lapangan	Dusun Bulu-Bulu	100.000.000	20,53
3	Pipa	Dusun Bulu-Bulu	53.654.000	11,02
4	Plat Dekker	Dusun Bonto-Bontoa	12.540.000	2,57
5	Drainase	Dusun Bulu-Bulu	87.703.000	18,01
6	Rabat Beton	Dusun Bulu-Bulu	19.480.000	4,00
7	Rabat Beton	Dusun Bulu-Bulu	152.875.000	31,39
Total Anggaran			487.015.000	100,00

Sumber: Desa Bonto Bontoa

Dapat di lihat dari tabel 4.4 pada tahun 2020 ada 7 pembangunan infrastruktur di desa Bonto Bontoa dengan total pengeluaran anggaran dana desa sebesar Rp.487.015.000 dengan pembangunan rabat beton menjadi penggunaan anggaran terbesar di tahun 2020 dengan total Rp.152.875.000.

Tabel 4.5 Program Pembangunan Infrastruktur di desa bonto bontoa

No	Program	Lokasi	Anggaran	%
1	Perpipaan	Dusun Bulu-Bulu	47.154.000	30,71
2	Drainase	Dusun Bulu-Bulu	34.072.000	22,19
3	Drainase	Dusun Bulu-Bulu	72.312.000	47,10
Total Anggaran			153.538.000	100,00

Tahun 2021

Sumber: Desa Bonto Bontoa

Dapat di lihat dari tabel 4.5 pada tahun 2021 ada 3 pembangunan infrastruktur di desa Bonto Bontoa dengan total pengeluaran anggaran dana desa sebesar Rp.153.538.000 dengan pembangunan drainase menjadi penggunaan anggaran terbesar di tahun 2021 dengan total Rp.72.312.000.

Tabel 4.6 Program Pembangunan Infrastruktur di desa bonto bontoa

No	Program	Lokasi	Anggaran	%
1	Sumur Bor	Dusun Bulu-Bulu	44.605.000	37,41
2	Sumur Bor	Dusun Bonto-Bontoa	44.605.000	37,41
3	Lampu Jalan	Desa Bonto-Bontoa	30.029.700	25,18
Total Anggaran			119.239.700	62,59

2022

Sumber: Desa Bonto Bontoa

Dapat di lihat dari tabel 4.6 pada tahun 2022 ada 3 pembangunan infrastruktur di desa Bonto Bontoa dengan total pengeluaran anggaran dana desa sebesar Rp.119.5239.000 dengan pembangunan drainase menjadi penggunaan anggaran terbesar di tahun 2022 dengan total Rp.44.605.000.

Tabel 4.7 Program Pembangunan Infrastruktur di desa bonto bontoa Tahun 2023

No	Program	Lokasi	Anggaran	%
1	Rehab Jalan Tani	Dusun Bonto-Bontoa	205.357.000	81,18
2	Sumur Bor	Dusun Bulu-Bulu	47.600.000	18,82
Total Anggaran			252.957.000	100,00

Sumber: Desa Bonto Bontoa

Dapat di lihat dari tabel 4.7 pada tahun 2023 ada 3 pembangunan infrastruktur di desa Bonto Bontoa dengan total pengeluaran anggaran dana

desa sebesar Rp.252.957.000 dengan pembangunan drainase menjadi penggunaan anggaran terbesar di tahun 2023 dengan total Rp.205.357.000.

2. Efektifitas Dana Desa

Efektifitas Dana Desa adalah sebagai berikut :

a. Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan dilihat dari indikator pencapaian tujuan.

- Dalam indikator pencapaian tujuan ada dua sub indikator yang perlu dilihat yang terdiri dari tepat waktu dan tepat target atau tepat sasaran. Berdasarkan hasil-hasil temuan yang didapatkan melalui wawancara dengan kepala desa, aparat desa serta masyarakat desa Bonto Bontoa, bahwa untuk pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Bonto Bontoa semua dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan juga pelaksanaan program pembangunan tersebut tentunya sudah tepat di Desa Bonto Bontoa, karena melalui pembangunan tersebut maka masyarakat Desa Bonto Bontoa sangat merasa terbantu dan juga program tersebut sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Bonto Bontoa. Adapun beberapa program tersebut seperti program pembangunan drainase, pembangunan jalan pemukiman
- Efektivitas pelaksanaan program pembangunan infrastruktur pedesaan dilihat dari indikator itegrasi.

Dari hasil temuan dapat diketahui bahwa sebelum pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan di Desa Bonto Bontoa terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat melalui musyawarah Desa/musyawarah dusun, pelaksanaan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta masyarakat juga sangat tertarik akan program tersebut mengingat untuk pembangunan Desa Bonto Bontoa juga untuk kemajuan Desa.

- Efektivitas pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan dilihat dari indikator adaptasi

Adapun pelaksanaan Program Pembangunan ekonomi dan Infrastruktur Perdesaan dimulai dari tahap perencanaan program melalui rapat dusun kemudian usulan masyarakat dirangkum kemudian dibawah ke musyawarah desa sebelum melaksanakan pembangunan dilaksanakan terlebih dahulu rapat para pelaksanaan kegiatan yang juga melibatkan masyarakat dan tenaga kerja. Adapun Anggaran untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut berasal dari Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dimana 30% digunakan untuk operasional dan 70% digunakan untuk pembangunan. Dana desa dikatakan efektif apabila dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan juga kebijakan dana desa itu sendiri. Efektivitas kebijakan dana desa dapat diukur menggunakan lima ketepatan yaitu tepat kebijakan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses (Fhatimatuz, 2018)

Berdasarkan siklus dalam kegiatan dana desa dari Desa Bonto Jai Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng adalah Penyiapan rencana, Musrenbangdesa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa, Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APB desa, Penetapan APB desa, Pelaksanaan pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola, Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan pelaporan di dalam musyawarah pembangunan desa dan Pemanfaatan dan pemeliharaan

a. Efektivitas Kebijakan Dana Desa

Efektivitas Kebijakan Dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana Desa. Dalam penerapan alokasi dan tahapan yang akan dicapai kedepannya, tim pelaksana Desa perlu bersikap terbuka kepada seluruh masyarakat. Keterbukaan informasi ini merupakan upaya pemerintah Desa untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bonto bontoa agar menciptakan suatu rasa kepercayaan terhadap pemerintah desa agar masyarakat juga paham program apa saja yang akan dijalankan. Kebijakan yang dikeluarkan harus berdasarkan pada seluruh aspek bagian yang menjadi salah satu unsur dalam pengalokasian dana desa agar dapat efektif dan berjalan sesuai dengan rencana dengan melihat beberapa faktor berdasarkan dari luas wilayah, tingkat produktifitas masyarakat dan fasilitas umum yang diperoleh masyarakat di Bonto bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan pada luas wilayah maka dapat dijelaskan Desa Bonto Bontoa Seluas 4,09 km²

Efektivitas suatu kebijakan dapat dipengaruhi dari luas wilayah yang akan mempengaruhi kebijakan tersebut dalam melihat kebijakan apa yang harus dikeluarkan agar dapat secara efektif berjalan dan berguna bagi masyarakat. Dari setiap orientasi kebijakan yang direncanakan, sedang dijalankan dan terealisasi seluruh kebijakan dibahas secara musyawarah agar aspek yang direncanakan dapat dievaluasi terlebih dahulu sehingga efektivitas kebijakan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan mendengarkan pendapat dari seluruh masyarakat agar kebijakan yang akan dijalankan dapat berjalan dengan efektif berdasarkan analisis isi wawancara terhadap responden atau narasumber banyak menyebutkan bahwa. Pelaksanaan efektivitas kebijakan dana desa tersebut telah dibuktikan dari pernyataan H. Syamsuddin. B sebagai Kepala Desa Bonto Bontoa menjelaskan bahwa:

“Pelaksanaan musyawarah yang dilakukan bersama dengan BPD (Badan Pemerintah Daerah) dan masyarakat melalui musyawarah dalam membahas terkait kebijakan yang akan dijalankan guna tercapai suatu efektivitas kebijakan dana desa” Wawancara ini berlangsung pada 22 April 2024.

Pengawasan dari seluruh elemen masyarakat terhadap alokasi dana desa dari program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur agar dapat terus dijalankan sehingga Efektivitas Kebijakan Dana Desa sesuai dengan harapan masyarakat Desa Bonto Bontoa. Pelaksanaan Efektivitas Kebijakan Dana Desa tersebut telah dibuktikan dari pernyataan Reskianto, S.Pd sebagai Sekertaris Desa Bonto Bontoa menjelaskan bahwa

“Sudah dijalankan dan direalisasikan dengan tepat waktu karena pembangunan ini sudah sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan sudah memenuhi kebutuhan masyarakat setempat” 22 April 2024

Jadi diketahui dari pelaksanaan musyawarah yang dilakukan pemerintah desa dan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kebijakan dari program Pembangunan Ekonomi dan infrastruktur agar dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga Efektivitas Kebijakan Dana Desa dapat berjalan dengan baik.

b. Infrastruktur

Infrastruktur fisik dan sosial dapat digunakan sebagai kebutuhan dasar masyarakat dengan sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan. Dari 100% kebijakan alokasi dana desa 70% untuk pembangunan infrastruktur dan 30% untuk pemberdayaan masyarakat desa, Infrastruktur yang saat ini terealisasi di desa Bonto Bontoa dan bermanfaat bagi masyarakat yaitu penyediaan sumur bor bagi masyarakat di desa Bonto Bontoa.

Dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air pada masyarakat yang ada di desa Bonto Bontoa. Kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat agar lebih memfokuskan pada pembangunan fisik sehingga dapat bermanfaat dan banyak membantu masyarakat dalam menggunakan penyediaan layanan air dari sumur bor. Berdasarkan analisis isi wawancara terhadap responden atau narasumber banyak menyebutkan bahwa. Dari program Infrastruktur kebijakan dana desa tersebut telah

dibuktikan dari pernyataan Aziz bekerja sebagai Wirasuwasta menjelaskan bahwa :

“Keuntungan yang didapatkan bagi masyarakat Desa Bonto-Bontoa dalam program Infrastruktur sangat membantu dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari mulai dari Infrastruktur jalan hingga penyediaan sumur bor di Desa Bonto Bontoa” 22 April 2024.

Manfaat yang didapatkan dari Infrastruktur sangat beragam dan berguna dalam membantu mobilitas kegiatan masyarakat dari berbagai aspek kemudahan tersebut pemerintah Desa Bonto Jai harus banyak memperhatikan kebutuhan dari seluruh masyarakat agar Infrastruktur yang direncanakan dan dijalankan dapat membantu masyarakat dalam pemanfaatannya. Dari program Infrastruktur kebijakan dana desa tersebut telah dibuktikan dari pernyataan Riswan bekerja sebagai Wiraswasta menjelaskan bahwa :

“Sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas terkhusus pada penggunaan jalan dan masyarakat yang mengalami kekurangan ketersediaan air untuk keperluan sehari-hari 22 April 2024.

Seluruh program Infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah Desa Bonto Bontoa sebagai upaya membantu mobilitas masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dari Infrastruktur jalan dan sumur bor jaringan sehingga masyarakat di Desa Bonto Bontoa dapat sangat terbantu dan memudahkan masyarakat saat musim kemarau berkepanjangan.

Dari hasil penelitian tersebut diatas dari Efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa Bonto Bontoa Kecamatan Tombolo Kabuapetn Bantaeng dari program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur sudah berjalan sangat

baik pada Efektivitas Kebijakan Dana Desa. Dari setiap bentuk program yang direncanakan dan telah terealisasi seluruh elemen masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan pada musyawarah dan bentuk perhatian masyarakat Desa Bonto Bontoa agar dapat mengawasi efektivitas kebijakan program yang dijalankan. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkepanjangan dengan tetap menyesuaikan situasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan menjelaskan beberapa pernyataan dari setiap reponden yang telah diuraikan di atas dapat dirangkum bahwa:

1. Efektivitas Kebijakan Dana Desa bagi Pembangunan Infrastruktur mengacu pada setiap aspek pelaksanaannya dalam menjalankan dan merealisasikan seluruh program agar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat, Hal ini dibuktikan dari keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah pada pengambilan suatu keputusan dan antusias masyarakat dalam mengawasi setiap program yang akan dijalankan sehingga dapat tercapai Efektivitas Kebijakan Dana Desa. Maka dapat dijelaskan bahwa efektivitas bagi program Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur dapat berjalan dengan baik di Desa Bonto Bontoa Kecamatan Tombolo Kabupaten Bantaeng.
2. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Infrastruktur dapat dinilai secara langsung karena bentuk dari Infrastruktur memiliki wujud dan fisik yang ada

sehingga Infrastruktur merupakan keuntungan yang didapatkan bagi masyarakat dari fasilitas jalan yang baik sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan nyaman saat berkendara dan dalam bentuk kerjasama yang dilakukan pemerintah Desa Bonto Bontoa dengan penyediaan sumur bor, sehingga masyarakat sangat terbantu dengan hadirnya sumur bor yang memudahkan masyarakat dalam penyediaan air di Desa Bonto Bontoa Kecamatan Tombolo Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunia Novita Sari. 2017. Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Langkat. Hasil penelitian ini kebijakan dana desamemiliki peran dalam penambahan saran dan prasarana fisik dipedesaan, memberikan peningkatan pendapatan rill masyarakat pedesaan, namun masih lebih besar persentase yang menyatakan tidak bertambahnya pendapatab masyarakat dan lebih banyak yang berpendapat bahwa jika ada peningkatan pendapatan mereka, bukan di sebabkan karna adanya dana desa melainkan dari faktor usaha masyarakat sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Program Pembangunan ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Desa Bonto Bontoa jika dilihat dari tiga indikator efektivitas mulai dari indikator yang pertama yaitu pencapaian tujuan, dimana dalam pelaksanaan program tersebut semua dilaksanakan dan terselesaikan dengan tepat waktu dan tepat sasaran karena melalui pembangunan tersebut masyarakat merasa sangat terbantu dan juga sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Bonto Bontoa. Untuk indikator yang kedua yaitu integrasi, dimana program tersebut telah atau sudah pernah disosialisasikan terlebih dahulu dalam musyawarah Desa sebelum melaksanakan program pembangunan. Kemudian indikator yang ketiga yaitu adaptasi, dimana untuk perencanaan program dan pelaksanaannya dilapangan sudah bertahap dan sesuai dengan ketentuannya

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan maka, saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya transparan dalam anggaran pembangunan ekonomi dan infrastruktur
2. Kurangnya pengawalan terhadap pengembangan sumber perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Graha Ilmu, Makassar.
- Anggraini, and Susan Dwi. 2015. *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas*. (<http://literaturbook.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-efektivitas-dan-landasan.html>.Diakses29 Juli2016).
- Arsyad, Lincolin, 2010. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Kelima, UPPSTIM YKPN, Yogyakarta.
- Bintarto, R1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Yogyakarta.
- Canning dan Pedroni.2004. *Pengaruh infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang*. (<https://econpapers.repec.org/paper/wilwileco/2004-04.htm>)
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. IPBPress, Bogor,
- Dini, Gemala Sari, 2010. Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa diKecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hapsari, Tanjung, 2011. Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia" *Skripsi, UINSyarif Hidayatullah*, Jakarta.
- Jamaludin, A. N. (2015). *Sosiologi perkotaan: memahami masyarakat kota dan problematikanya*.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001.*Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta: Pustaka CIDESINDO.
- KemenkeuRI, 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan RepublikIndonesia.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Mamang Sangadji, Ettadan Sopiah,2010. *Metodologi Penelitian*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nurliana, 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik diDesa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara. *EJournal Administrasi Negara*, Volume1 No.3,2013: 1059-1070.
- PPID " Peraturan Dana Desa " <https://ppid.kominfo.go.id/regulasi/peraturan-dana-desa> (diakses1 Februari2018).
- Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. 2004. *Manajemen Jilid 1. Alih Bahasa T. Hermaya*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia

Sari, Y. N. (2017). *Efektivitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Langkat* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*, Jakarta.

2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*, Jakarta.

2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta.

2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*, Jakarta.

2015. *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desayang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.





The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with rays, surrounded by a circular border containing the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' at the top and 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN' at the bottom. The shield is flanked by two crossed branches, possibly representing a tree or a similar symbol. The entire logo is rendered in a light blue color.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

No.	Daftar Pertanyaan	Coding
	Kepala Desa	
1.1	Apakah benar bapak sendiri yang merencanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang ada di Desa ini?	R
1.2	Apa yang mendorong sehingga bapak berinisiatif untuk mengadakan pembangunan tersebut?	R
1.3	Menurut bapak apakah pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya?	R
1.4	Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan program ini?	R
1.5	Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan?	R
1.6	Apakah bapak terjun langsung dalam mengawasi proses pelaksanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut?	R
1.7	Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program pembanguan ini?	R
1.8	Bagaimana bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap program ini?	R
1.9	Kapan saja dilaksanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Desa ini?	R
1.10	Apa dampak positif yang ditimbulkan dari program ini?	R
1.11	Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program ini?	R
NO	Pertanyaan	Coding
	Masyarakat	
2.1	Siapa yang merencanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J
2.2	Siapa yang merencanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J

2.3	Bagaimana tanggapan anda tentang pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J
2.4	Apakah pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini sudah tepat waktu dan sudah tepat sasaran dalam tahapan pengerjaannya?	M, K, DFA, MS, J
2.5	Apakah dalam rapat perencanaan pembangunan ekonomi dan infrastruktur desa telah melibatkan peran penting masyarakat dalam pengambilan keputusan?	M, K, DFA, MS, J
2.6	Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program pembanguan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J
2.7	Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dalam merencanakan program tersebut?	M, K, DFA, MS, J
2.8	Kendala apa saja yang di hadapi dalam pelaksanaan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur tersebut?	M, K, DFA, MS, J
2.9	Apakah dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur masyarakat dilibatkan dalam mengontrol pembangunan tersebut?	M, K, DFA, MS, J
2.10	Kapan saja dilaksanakan program pembangunan ekonomi dan infrastruktur pembangunan di Desa ini?	M, K, DFA, MS, J
2.11	Apa dampak negatif yang ditimbulkan dari program pembangunan ekonomi dan infrastruktur ini?	M, K, DFA, MS, J

PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN 3

HASIL PENELITIAN

No	Jenis>Nama Barang	Panjang (Km)	Letak/lokasi	Status Tanah	Harga (Rp ribuan)	Ket
1	Pembangunan Drainase	235,5 M dan 133 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	116.459.000	2019
2	Pembangunan Talud	65 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	10.342.000	2019
3	Pembangunan Darinase	63 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	23.441.000	2019
4	Pembangunan Jalan Pemukiman	65 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	34.037.000	2019
5	Pembangunan Drainase	137M	Dusun Taricco	Tanah Negara	67.268.000	2019
6	Pembangunan Jalan Tani	440m	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Desa	19.519.000	2019
7	Pembangunan Drainase	163M	Dusun Bonto-Bontoa	Tanah Negara	112.082.000	2019
8	Pembangunan Drainase	106M	Dusun Bonto-Bontoa	Negara	111.242.000	2019
9	Jalan Pemukiman	50M	Dusun Taricco	Tanah Desa	21.141.750	2019
10	Pembangunan Jalan Pemukiman	26 M	Dusun Taricco	Tanah Negara	9.809.000	2019
11	Pembangunan Darinase	193 M	Dusun Bonto-Bontoa	Tanah Negara	157.859.000	2019
12	Pembangunan Talud	65 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	10.284.000	2019
13	Jembatan	3x3 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	60.763.000	2020
14	Lapangan		Dusun Bulu-Bulu	Tanah Desa	100.000.000	2020

15	Pipa	650 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	53.654.000	2020
16	Plat Dekker	1,2X5,0 M	Dusun Bonto-Bontoa	Tanah Negara	12.540.000	2020
17	Drainase	80 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	87.703.000	2020
18	Rabat Beton	33 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	19.480.000	2020
19	Rabat Beton	250 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	152.875.000	2020
20	Perpipaan	250 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	47.154.000	2021
21	Drainase	70 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	34.072.000	2021
22	Drainase	88 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Negara	72.312.000	2021
23	Sumur Bor	50 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Desa	44.605.000	2022
24	Sumur Bor	50 M	Dusun Bonto-Bontoa	Tanah Desa	44.605.000	2022
25	Lampu Jalan	11 Unit	Desa Bonto-Bontoa	Tanah Desa	30.029.700	2022
26	Rehab Jalan Tani	290x3 M	Dusun Bonto-Bontoa	Tanah Desa	205.357.000	2023
27	Sumur Bor	58 M	Dusun Bulu-Bulu	Tanah Desa	47.600.000	2023

LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PENELITIAN





LAMPIRAN 4

SURAT PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 161/05/A-2-II/II/45/2024 Makassar, 27 Februari 2024

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar

Di-

Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Nursyamsi

Stambuk : 105711106120

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Judul Penelitian : Efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa bonto-bontoa kecamatan Tompobulu kabupaten bantaeng

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terimakasih.

Dekan.

Dr. H. Andi Jun'an, S.E., M.Si

Tembusan:

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Arsip



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 3778/05/C.4-VIII/II/1445/2024

28 February 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 Sya'ban 1445

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 161/05/A.2-II/II/45/2024 tanggal 27 Februari 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURSYAMSI

No. Stambuk : 10571 116120

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Efektivitas Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Toppobulu Kabupaten Bantaeng"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Maret 2024 s/d 5 Mei 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **4695/S.01/PTSP/2024** Kepada Yth.
Lampiran : - Bupati Bantaeng
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 3779/05/C.4-VIII/II/1445/2024 tanggal 28 februari 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURSYAMSI**
Nomor Pokok : 105711106120
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" Efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa bonto-bontoa kecamatan tompobulu Kabupaten Bantaeng "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Maret s/d 05 Mei 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 28 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dprmpstp.bantaengkab@gmail.com, website : dprmpstp.bantaengkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7/39/SKP/DPM-PTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama	: NURSYAMSI
Jenis Kelamin	: Perempuan
N I M	: 1057111106120
No. KTP	: 7303046212020002
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan	: Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar
Alamat	: Jl. Baji Areng Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :
"Efektivitas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng"

Lokasi Penelitian : Desa Bonto-Bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Lama Penelitian : 05 Maret 2024 s.d. 05 Mei 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pada prinsipnya kami dapat *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudahnya melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan harus melapor kepada Pemerintah setempat;
 2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
 3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat- istiadat Daerah setempat;
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil Penelitian kepada Bupati Bantaeng Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantaeng;
 5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian surat keterangan ini dibenarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 01 Maret 2024

a.n. **BUPATI BANTAENG**

Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1202419328000039



YOHANIS PHR ROMUTI, S.IP
Pangkat : Pembina TK.I, IV/b

LAMPIRAN 5

TURNITING



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nursyamsi

Nim : 105711106120

Program Studi : Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	16 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 31 Juli 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nufusiani, S.Hum.,M.I.P
NIP. 1.964 591

BAB I Nursyamsi 105711106120

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

2

adoc.pub

Internet Source

2%

3

siat.ung.ac.id

Internet Source

2%

4

Ayi Sofian. "Strategi Tata Kelola BUMDes dalam Upaya Menunjang Ekonomi Masyarakat di Desa Pamulihan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2021

Publication

2%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB II Nursyamsi 105711106120

ORIGINALITY REPORT

16% SIMILARITY INDEX **16%** INTERNET SOURCES **0%** PUBLICATIONS **0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source		11%
2	repository.umpalopo.ac.id Internet Source		3%
3	123dok.com Internet Source		2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BAB III Nursyamsi 105711106120

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

2%

2

repository.umy.ac.id

Internet Source

2%

3

jurnalmahasiswa.unesa.ac.id

Internet Source

2%

4

Submitted to Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara

Student Paper

2%

5

repository.stkippacitan.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off



BAB IV Nursyamsi 105711106120

ORIGINALITY REPORT

5%	5%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	desabontobontoa.wordpress.com Internet Source	3%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%



Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



BAB V Nursyamsi 105711106120

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



BIOGRAFI PENULIS



Nursyamsi panggilan Nur lahir di Bantaeng pada tanggal 22 Desember 2002 dari pasangan suami istri Bapak Gaffar dan Ibu Salmah. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Bonto-bontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Inpres Panranggaji pada tahun 2008 hingga lulus pada tahun 2014, lalu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Tompobulu pada tahun 2014 hingga lulus tahun 2017, setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di SMk Negeri 3 Bantaeng pada tahun 2017 hingga lulus pada tahun 2020, setelah itu penulis melanjutkan studi ke jenjang Universitas Muhammadiyah Makassar, fakultas ekonomi dan bisnis Program studi ekonomi dan bisnis. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.